

**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**2025/08/21/A4 Membuat video animasi ‘Proses Penegakan Hukum Pidana’**  
**tahap 1 (pengumpulan aset)**



The image shows a presentation slide with a video player in the center. The video is from METRO TV and shows a news segment about corruption. The title of the video is 'KORUPSI TIMAH, KERUGIAN NEGARA 300 TRILJUN RUPIAH'. The video player has a play button, a progress bar, and a search bar at the top. The presentation slide has a toolbar at the top with various icons for file operations, zoom, and slide navigation. The main content area is a large white space.

**HPL01-02 Sistem Penegakan Hukpid.md — narration**

```
enegakan Hukpid > HPL01-02 Sistem Penegakan Hukpid.md > # PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN > ## Visual Suggestions: 8 rekomendasi visual > ### BAGIAN 1: PEMBUKAAN (0:00-0:45)
 9 # PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PERTAMBANGAN
10
11 ## Visual Suggestions: 8 rekomendasi visual
12
13 ---
14
15
16
17 ### BAGIAN 1: PEMBUKAAN (0:00-0:45)
18
19 Dalam era pembangunan ekonomi yang pesat, sektor pertambangan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, sektor ini juga rentan terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.
20
21 Selamat datang dalam pembelajaran Penegakan hukum pidana di sektor pertambangan. Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem hukum pidana berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di sektor pertambangan. Mulai dari memahami konsep dasar penegakan hukum pidana, mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi, hingga mengenal lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
22
23 **Visual:** Montase foto kegiatan pertambangan Indonesia dengan overlay grafik statistik pelanggaran hukum pertambangan
24
25
26
27 ### BAGIAN 2: KONSEP DASAR PENEGAKAN HUKUM PIDANA (0:45-2:00)
28
29 Mari kita mulai dengan memahami pengertian penegakan hukum pidana. Menurut Profesor Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kenyataan. Sedangkan untuk penegakan hukum pidana, Profesor Barda Nawawi Arief mendefinisikannya sebagai bagian dari hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat melalui penerapan sanksi yang adil dan proporsional. Profesor Jimly Asshiddiqie melengkapi definisi tersebut menjadi proses aplikatif dari hukum pidana substantif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
30
31 Dalam konteks pertambangan, penegakan hukum pidana memiliki karakteristik khusus. Ia tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Penegakan hukum di sini bersifat represif atau menekan melalui pemberian sanksi pidana, dan juga preventif atau pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan.
32
33 Tujuan penegakan hukum pidana dalam pertambangan mencakup tiga tujuan utama.
34 Pertama, menciptakan kepastian hukum (rechtszekerheit). Artinya, aturan harus ditegakkan secara konsisten. Jika tidak, hukum hanya jadi pajangan.
35 Kedua, memberikan keadilan. Setiap pihak-perusahaan, masyarakat, negara-harus diperlakukan sama. Pelanggar harus dihukum, korban harus dilindungi.
36 Ketiga, memberikan perlindungan hukum. Ini berarti negara hadir untuk melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang, termasuk eksplorasi sumber daya alam yang merugikan.
37
38 **Visual:** Diagram piramida menunjukkan hierarki tujuan penegakan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum
```

Ln 21, Col 205 Spaces: 4 UTF-8 LF () Markdown ⚡ Finish Setup ⚡ Laravel Pint ✓ Prettier